**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. **Profil Dinas Kebudayaan Kota Medan**

Gedung Dinas Kebudayaan kota Medan terletak di sebelah Selatan gedung Walikota Medan tepatnya di jalan Raden Saleh, sebelah Timur dari gedung Bank Indonesia, sebelah Barat dari Merdeka Walk. Di belakang gedung Dinas Kebudayaan Kota Medan terdapat jalan Ahmad Yani VII dan jalan Hindu tepatnya gedung Warenhuis berdiri. Dinas kebudayaan kota Medan ber-alamat di jalan Raden Saleh Nomor 7-9, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236. Terdapat tiga gedung yang berada di jalan Raden Saleh yaitu gedung ANTARA Sumatera Utara, gedung Dinas Kebudayaan, gedung Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Medan, dan gedung Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara. Gedung Dinas Kebudayaan Kota Medan berada di tengah-tengah yaitu di sebelah kiri berdampingan dengan gedung ANTARA Sumatera utara dan di sebelah kanan berdampingan dengan gedung gedung Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Medan, dan gedung Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara.

1. **Sejarah Berdirinya**

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkwalitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

 Sejak tahun 1991 telah terbentuk Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian pada tahun 2001 ditambah urusan kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan jo. SK Wali Kota Medan No. 20/2002 tentang Tujuan dan Fungsi Dinas dan Kebudayaan Kota Medan. Dan perubahan terakhir dengan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007, jo.Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali KotaMedan melalui Sekretaris Daerah. Kemudian pada tahun 2017, melalui Peraturan Wali KotaMedan (Perwal) Nomor 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan diubah kembali menjadi Dinas Pariwisata Kota Medan. Urusan kebudayaan dipisahkan menjadi Dinas Kebudayaan Kota Medan. Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

1. **Struktural Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan**
2. **Tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan cagar budaya**
3. Bidang kebudayaan dan cagar budaya dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris
4. Kepada bidang kebudayaan dan caga budaya mempunyai tugas kepala dinas lingkup kebudayaan dan cagar budaya
5. Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas bidang kebudayaan dan cagar budaya menyelenggarakan fungsi
6. Perencanaan program dan kegiatan bidang kebudayaan dan cagar budaya dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
7. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang kebudayaan dan cagar budaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
8. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan atau pemprosesan kedisiplinan Pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang kebudayaan dan cagar budaya berdasarkan atas peraturan perundag-undangan
9. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan teknis kebudayaan;
10. Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan penyuluhan misalnya penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah cagar budaya
11. Pengendalian, evaluasi dam penilaian lingkup bidang kebudayaan dan cagar budaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
12. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
13. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala dinas
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas.

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala bidang kebudayaan dan cagar budaya membawahkan 3 kepala seksi, antara lain:

a. Kepala seksi kebudayaan

b. Kepala seksi cagar budaya

c. Kepala seksi penyuluhan.

**B. Inventarisasi Regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Cagar Budaya**

**a). Landasan Filosofis UUD 1945**

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat (1) disebutkan bahwa: ’’Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”[[1]](#footnote-1)

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan bangsa yang mengandung nilai-nilai dan kearifan lokal yang khas karena bersifat kedaerahan. Sebagai negara yang pluralis, Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang merupakan peninggalan masyarakat pada zaman dahulu. Kebudayaan dapat berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible). Kebudayaan yang berwujud merupakan hasil dari cipta karya manusia berupa benda-benda ataupun bangunan yang mempunyai bentuk tertentu, benda inilah yang disebut dengan cagar budaya.

Sedangkan kebudayaan yang tidak berwujud dapat berupa nilai-nilai, tradisi, cerita, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Kebudayaan yang berwujud atau cagar budaya memerlukan perhatian dan perlindungan dari negara karena kondisinya yang sudah berumur, mudah rusak, dan tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan dan kebebasan terhadap masyarakat untuk menjaga, memelihara dan melestarikannya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

**b) Landasan Konstitusinal**

1. **UU NO. 28 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung[[2]](#footnote-2)**

UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan. Pengaturan bangunan gedung dalam UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Definisi Bangunan Gedung dalam UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Lingkup bangunan gedung fungsi usaha dalam UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah:

1. perkantoran, termasuk kantor yang disewakan
2. perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mall
3. perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan
4. perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel
5. wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan
6. terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut
7. penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.

UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengisyaratkan tentang persyaratan bangunan gedung, diantaranya adalah:

1. Persyaratan lingkungan bangunan gedung meliputi persyaratan-persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan, ruang sempadan bangunan, tapak basement, hijau pada bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir, pertandaan, dan pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
2. Persyaratan terhadap dampak lingkungan berpedoman kepada Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
3. Persyaratan teknis pengelolaan dampak lingkungan meliputi persyaratan teknis bangunan, persyaratan pelaksanaan konstruksi, pembuangan limbah cair dan padat, serta pengelolaan daerah bencana.

Tentang rencana tata bangunan dan lingkungan juga disinggung dalam UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, hal tersebut seperti:

1. Rencana tata bangunan dan lingkungan digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana rinci tata ruang dan sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual.
2. Rencana tata bangunan dan lingkungan memuat persyaratan tata bangunan yang terdiri atas ketentuan program bangunan gedung dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
3. Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat disusun berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.

**b) UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [[3]](#footnote-3)**

Pertimbangan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

1. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
2. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan
5. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga antisipasi isu lingkungan global.UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah jaminan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Penjelasan Atas UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

**c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:[[4]](#footnote-4)

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
13. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
14. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
15. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
20. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. 29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
35. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
36. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

**d) Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

1. bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[5]](#footnote-5)
2. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna
3. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

**e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya**

 Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional berawal dari kesadaran bahwa ada perbedaan tingkat kemampuan dalam masyarakat untuk menyerap dan memanfaatkan serta menanggapi hasil-hasil dari pembangunan yang sedang di jalankan. Kesadaran bahwa masyarakat dan budaya di Indonesia beraneka ragam dan perlu adanya kelestarian dalam rangka menunjang upaya pengembangan kebudayaan Nasional. Dengan mempertimbangkan wilayah Culture dari masing-masing daerah, maka terbentuklah 11 (sebelas) Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional yang mempunyai bidang kajian yang berbeda-beda. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak mempunyai wilayah seluruh Pulau Kalimantan dan ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No : PM.38/OT.001/MKP/2006 tanggal 4 September 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak yang telah berganti nama menjadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional yang biasa disebut Balai Pelestarian secara operasional mulai berjalan pada tahun 1990 dengan menempati gedung yang ada di Jalan Letjen Sutoyo Pontianak. landasan Hukum yang memberi kewenangan terhadap Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak dalam menjalankan tugasnya dapat ditelusuri dari sejarah/kronologis terbentuknya UPT dari awal hingga saat ini adalah :[[6]](#footnote-6)

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/0/1989, tanggal 4 Agustus 1989, tentang organisasi dan tata kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di empat lokasi.
2. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-01/BP.BUDPAR/2001, tanggal 13 Desember 2001, tentang Organisasi dan TataKerja Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
3. eputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.52/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.17/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Atas dasar landasan hukum diatas Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak yang selanjutnya disebut Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kebudayaan dan pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Direktur Tradisi, dan sepanjang yang berkaitan dengan sejarah dikoordinasikan dengan Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala.

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya dan di Undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka pada tanggal 20 Juli 2012 Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya berganti nama menjadi Balai Pelestarian Nilai Budaya yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 Balai Pelestarian Cagar Budaya atau disingkat dengan BPCB, merupakan lembaga yang kedudukannya berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk melakukan upaya pelestarian dan konservasi terhadap cagar budaya. BPCB memiliki kantor perwakilan yang berada di setiap Provinsi di Indonesia. Rincian tugas BPCP diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, yaitu antara lain:

1. melaksanakan penyusunan program kerja Balai

2. melaksanakan kajian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya

3. melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, cagar budaya

4. melaksanakan zonasi cagar budaya

5. melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya

6. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya

7. melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya

8. melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya

9. melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya

10. melaksanakan sosialisasi cagar budaya

11. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya

12. melaksanakan pemberian bantuan teknis pelaksanaan pelestarian cagar budaya

13. melaksanakan pemberian bantuan teknis pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya

14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelestarian cagar budaya

15. melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya

16. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggaan Balai

17. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai

18. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai

19. melaksanakan penyusunan laporan Balai.

 Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berupaya melakukan pelestarian cagar budaya yaitu antara lain pemerintah daerah, masyarakat, pemilik cagar budaya, organisasi masyarakat pemerhati cagar budaya, dan lain sebagainya. BPCB adalah organisasi dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BPCB menjalankan koordinasi, dan memfasilitasi kebutuhan daerah atau masyarakat terkait dengan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di daerah, serta melakukan konservasi terhadap cagar budaya di setiap daerah yang ditentukan berdasarkan peringkat register nasional cagar budaya.

**f) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Cagar Budaya**

* 1. Daerah adalah Kota Medan:[[7]](#footnote-7)
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
7. Tim Pertimbangan Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar budaya yang selanjutnya disebut dengan Tim adalah kelembagaan Independen bertugas memberi pertimbangan usul dan saran kepada Pemerintahan Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan cagar budaya.
8. Kawasan adalah ruang kota dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional Serta memiliki ciri tertentu.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah ruang kota di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh tahun), serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
11. Pengelolaan Cagar Budaya adalah segenap proses perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, agar makna budaya yang dikandungnya terpelihara dengan baik.
12. Perlindungan adalah segala upaya mencegah dan mananggulang, segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses yang dapat menimbulkan kerusakan atau kemusnahan bagi nilai manfaat atau keutuhan bangunan cagar budaya.
13. Pelestarian atau konservasi adalah segala upaya memperpanjang usia kawan dan/atau bangunan cagar budaya berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan.
14. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan faktor manusia maupun alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
15. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memberdayakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelestariannya.
16. Pemintakatan adalah upaya penetapan batas-batas bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai peruntukannya menjadi mintakat inti, penyangga dan pengembangan.
17. Pemugaran adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian lingkungan dan/atau mempertahankan bangunan cagar budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologi, histori dan teknis.
18. Revitalisasi adalah upaya memberdayakan situasi dan kondisi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk berbagai fungsi yang mendukung pelestariannya.
19. Restorasi, rehabilitasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mengembalikan bentuknya ke keadaan semula tanpa menggunakan bahan baru.
20. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru, sesuai informasi kesejahteraan yang diketahui.
21. Adaptasi adalah mengubah bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa menuntut permohonan drastis.
22. Pemulihan adalah upaya pengembalian bentuk fisik bangunan ke kondisi semula, agar bangunan dapat dimanfaatkan kembali, baik dengan meneruskan fungsi semula maupun fungsi baru.
23. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau pra sarana dan sarananya.
24. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum perdata atau badan hukum publik.
25. Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
26. Preservasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.
27. Restorasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mengembalikan keadaan-keadaan semula dengan menghilangkan tambahan dan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.
28. Persil adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesua dengan batas kepemilikan lahan secara hokum/legal di dalam blok atau subblok.
29. Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah
30. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian, Perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berwenang:
31. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan bangunan dan/atau lingkungan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat para ahli.
32. Menetapkan jenis izin yang khusus diterbitkan.
33. Menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
34. Mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta mugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
35. Mengenalkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
36. Menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang dinilai belum dilaksanakan sampai yang bertanggungn jawab atar bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
37. Menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
38. Menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar/buyada.
39. Menetapkan bangunan dan/atau lingkungan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berdasarkan kriteria bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
40. Melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk penggolongan bangunan cagar budaya.
41. Melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap bangunan cagar budaya.
42. Mengatur perlindunganl, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
43. Memberikan izin kegiatan pemugaran dan pembongkaran terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.
44. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
45. Rencana Tata Ruang kota harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
46. Ketentuan lebiha lanjut mengenai wewenang Pemerintah Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

**h)** **Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2017**

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN :[[8]](#footnote-8)

1. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
2. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
3. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya

Pasal 11

Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 12

1. Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kebudayaan dan cagar budaya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi
3. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
4. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya " untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
5. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN *(reward and punishment)* dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
6. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan teknis kebudayaan
7. Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan penyuluhan misalnya penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah Cagar Budaya
8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan. penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain:
	1. Kepala seksi kebudayaan
	2. Kepala seksi cagar budaya
	3. Kepala seksi penyuluhan.

Paragraf 1 Seksi Kebudayaan

Pasal 13

Seksi Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya.

Pasal 14

1. Kepala Seksi Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya lingkup kebudayaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
	1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kebudayaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
	2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kebudayaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
	3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN *(reward and punishment}* dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kebudayaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
	4. penyusunan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat pemerintahan daerah
	5. penyusunan bahan kegiatan festival, pameran dan lomba secara berjenjangan dan berkala
	6. penyusunan bahan pengolahan data dan infomasi, penginventarisan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan
	7. penyusunan bahan/pelaksanaan analisis pengembangan tugas dan fungsi kebudayaan
	8. pengarsipan dokumentasi kebudayaan wilayah daerah dalam bentuk photo, video visual, kaset/cd, *microfilm,* dan lain-lain
	9. penyusunan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang menyelengarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang seni budaya
	10. penyusunan bahan rekomendasi usul pemberian bantuan kepada organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang budaya serta *izin* tugas tenaga teknis
	11. penyusunan bahan rekomendasi usul pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala pemerintah daerah
	12. penyusunan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan kebudayaan
	13. pengadaan layanan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan di bidang seni budaya.
	14. pengadaan pengawas dan pemeliharaan terhadap asset dokumentasi budaya
	15. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kebudayaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
	16. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
	17. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya
	18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Cagar Budaya

Pasal 15

Seksi Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya.

Pasal 16

1. Kepala Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya lingkup Cagar Budaya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:
	1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Cagar Budaya dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
	2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Cagar Budaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
	3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN *(reward and punishment)* dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
	4. penyusunan bahan tugas pelestarian dan pengembangan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya
	5. penyusunan bahan inventarisasi dokumen kebudayaan
	6. pengoordinasian perizinan membawa benda cagar budaya ke luar provinsi
	7. pengoordinasian perizinan survei atas pengangkatan Batasan Cagar Budaya (BCB) situs diatas 4-12 mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah
	8. penyusunan bahan pelaksanaan upaya perlindungan pemeliharahan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)
	9. pengoordinasian peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pemeliharahan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs
	10. penyusunan bahan rekomendasi atas penggunaan/ pemanfaatan cagar budaya

penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Cagar Budaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dan Cagar Budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

**C. Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan dan Peletarian Cagar Budaya**

**a. Perlindungan**

Dalam melakukan perlindungan dan pelestarian cagar budaya menurut undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam Undang-undang pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 41 bahwa ada tiga tingkat register cagar budaya mulai dari kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional.

Konsep desentralisasi perlindungan dan pelestarian warisan budaya di singkronkan dengan Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (direvisi menjadi Undang-undang No.12 tahun 2008).

Kota Medan sangat kaya warisan budaya perkotaannya terutama warisan arsitekturnya. Pada tahun 1988 yang pada masa itu dipimpin oleh bapak AS Rangkuti, ia menerbitkan Peraturan Daerah No.6 tentang pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan serta penghijauan diikuti dengan terbitnya sebuah surat keputusan No. 188.342/382/SK/1989 yang berisi tentang lampiran daftar bangunan dan kawasan yang dilindungi oleh pemerintahan kota Medan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, kegiatan perlindungan dan pelestarian warisan budaya di kota Medan mulai nampak eksistensinya semenjak berdirinya organisasi Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) cabang Sumatera Utara pada pertengahan tahun 1980-an. Konsep pelestarian yang terintegrasi dengan perencanaan kota belum banyak diterapkan diIndonesia terutama di kota Medan. Sehingga pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan daerah kota Medan No.13 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah kota Medan tahun 2011-2031 yang mana peraturan daerah ini memiliki keterkaitan dengan undang-undang penataan ruang No. 26 tahun 2007. Di dalam peraturan daerah ini menjelaskan mengenai rencana pola ruang yang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya diperuntukkan kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sesuai dengan peraturan daerah No. 13 tahun 2011 pada pasal 39 bahwa:

“Kawasan cagar budaya kota Medan merupakan kawasan Polonia, kawasan Kota Lama Labuhan Deli, (Thepekong Labuhan), Rumah-rumah toko Pekong, Rumah rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, Bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, kawasan Perumahan dan pergudangan yang semua DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) di Pulo Brayan, kawasan Istana Maimoon, kawasan kampung keling dan kawasan Kesawan.”

Tetapi, setelah enam tahun Perda ini belum dilengkapi garis besar kawasan strategis budaya yang dimaksud dalam pasal di atas. Sedangkan jika kita lihat didalam pasal 53 undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, penyusunan dan penetapan terhadap kawasan cagar budaya serta rencana pelestariannya harus bersandarkan pada hasil studi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Oleh karena itu, diperlukannya rencana program untuk menentukan garis besar dan perencanaan Jika kita lihat fakta di lapangan terdapat banyak sekali bangunan bersejarah di kota Medan yang dirubuhkan karena perubahan untuk lahan baru dan tidak berfungsi, seperti ruko-ruko yang berada di jalan Ahmad Yani dan pusat pasar juga sudah banyak yang berganti dengan bangunan baru. Terdapat deretan panjang bangunan bersejarah di kota Medan yang dirubuhkan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir berjumlah kurang lebih 28 bangunan dan kawasan, salah satunya termasuk Eks gedung Medan Warenhuis (eks Departemen Tenaga Kerja) di jalan Ahmad Yani VII simpang jalan Hindu, yang mana pada tahun 2013 atapnya terbakar habis. kawasan-kawasan strategis budaya tersebut.

Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan Tahun 2021-2024

A. Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan

B. Seketaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan

C. Anggota : 1. Kepala dinas perumahan , kawasan pemukiman, dan penataan ruang kota medan

 2. kepala bidang kebudayaan dan cagar budaya pada dinas kebudayaan kota medan

3. Lukas Pertanda Koestoro, DEA (ikatan ahli arkeologi indonesia)

4. Isnen Fitri .ST, M.Eng, PhD(beranda warisan sumatera)

5. Dra, Sri Hartini , Msi (direktur museum perkebunan indonesia)

6. Dr. Rita Margaretha Setianingsi, M.Hum (politeknik pariwisata medan)

7. Apriani Harahap,MA. (akademi universitas medan)

8. Sri Shindi Indira,ST, MSc. IALI (arsitek Lanskap)

“Dinas Kebudayaan dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan sudah pernah melakukan preservasi dan revitalisasi terhadap bangunan cagar budaya di kota Medan dan terhadap gedung Warenhuis juga sudah pernah dilakukan keduanya namun gedung tersebut rusak kembali dikarenakan pernah terjadinya kebakaran di tahun 2013 itulah mengakibatkan sebagian besar atapnya rusak, dinding serta lantai mengalami kapilarisasi dan ditumbuhi rerumputan liar, serta jendela dan pintu gedung Warenhuis pun sudah mengalami penjarahan. Tetapi tetap sampai sekarang ini, gedung Warenhuis dalam pengawasan Pemerintah Kota Medan walaupun gedung ini tidak berfungsi apa-apa. Mengenai rekontruksi yang merupakan perbaikan atau perehapan besar-besaran bukan lagi ranah Dinas Kebudayaan dan upaya rekontruksi juga tidak diperbolehkan karena cagar budaya ini dilarang untuk mengubah wujud keasliannya dari sejak semula berdiri hingga detik ini. Untuk upaya perbaikan atau perehapan dilaksanakan dan diserahkan kepada Dinas PUPRI dan tugas kami sebagai Dinas Kebudayaan dan seksi cagar budaya hanya bertugas untuk melakukan pendataan terhadap cagar budaya, pendeskripsian terhadap cagar budaya, pendataan mengenai sejarah cagar budaya, pendaftaran terhadap temuan cagar budaya, registrasi terhadap cagar budaya misalnya milik non Pemerintah dijadikan sebagai milik Pemerintah atas izin dari pemilik pribadi, cagar budaya temuan atau Bakal Calon Cagar Budaya (BCCB)”

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA

NOMOR : 433/28.K/X/2021

TANGGAL : 28 OKTOBER 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **No. Dokumen** | **Nama Objek Cagar Budaya** | **Alamat** |
| 1 | 01/CB/B/2021 | Masjid Raya Al Makhsun | Jl. SM Raja No. 64. |
| 2 | 02/CB/B/2021 | Masjid Al Osmani | Jl. K.LYos Sudarso, Km. 17,5 |
| 3 | 03/CB/B/2021 | Qereja Katolik St, Maria Tak Bernoda Asal | Jl. PemudaNo. 1. |
| 4 | 04/CB/B/2021 | Gereja HKBP Medati Sudirman | Jl. Jend. Sudirman No. 17 A. |
| 5 | 05/CB/B/2021 | Gereja Kristen Indonesia | Jl. Zainul Arifin No. 126. |
| 6 | 06/CB/B/2021 | Vihara Gunung Timur | Jl. Hang Tuah. |
| 7 | 07/CB/B/2021 | Rumah Tjong Afie | [Jl. A.Yanino.105](http://JLA.YaniNo.105). |
| 8 | 08/CB/B/2021 | RS. Santa Elisabeth | JL H.M Misbah No. 7 |
| 9 | 09/CB/B/2021 | RSU. Dokter Pirngadi | Jl.H.M YaminNo. 14 |
| 10 | 10/CB/B/2021 | Eks. RS Tembakau Deli | Jl. Putri Hijau. |
| 11 | ll/CB/B/2021 | RS. Militer Putri Hijau | Jl. Putri Hijau No. 16. |
| 12 | 12/CB/B/2021 | Sekolah TK Santo Yoseph | Jl. Palang Merah. |
| 13 | 13/CB/B/2021 | Sekolah Perguruan Kristen Immanuel | Jl. Slamet Riadi No. 1. |
| 14 | 14/CB/B/2021 | Gedung Eks. Balai Kota | Jl. Balai Kota No. 2. |
| 15 | 15/CB/B/2021 | Kantor Pos Besar | Jl Pos No. 1. |
| 16 | 16/CB/B/2021 | Kantor Bank Indonesia | Jl. Balai Kota No. 4. |
| 17 | 17/CB/B/2021 | Hotel Grand Inna | Jl. Balai Kota No. 6. |
| 18 | 18/CB/B/2021 | Eks. Kantor Departemen Tenaga Kerja | Jl. A Yani VII No. 32 - Jl. Hindu. |
| 19 | 19/CB/B/2021 | Toko Asia Jaya Furniture | Jl. Pemuda No. 2.  |
| 20 | 20/CB/B/2021 | Kantor Asuransi Wahana Tata (Aswata) | Jl. Pemuda No. 9. |
| 21 | 21/CB/B/2021 | Istana Maimoon | JL Brigjend Katamso No. 66. |
| 22 | 22/CB/B/2021 | Kantor Asuransi Jiwasraya dan Palang Merah | Jl. Palang Merah No. 1. |
| 23 | 23/CB/B/2021 | Bank Standard Charttered | Jl. Imam Bonjol No. 17- Palang Merah. |
| 24 | 24/CB/B/2021 | Museum Perjuangan TNI | Jl. Zainul Arifin No. 8. |
| 25 | 25/CB/B/2021 | Kantor Gubernur Sumatera Utara | Jl. Diponegoro No. 30. |
| 26 | 26/CB/B/2021 | Kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas IA | Jl. Diponegoro No. 9 dan 10. |
| 27 | 27/CB/B/2021 | Rumah Dinas Walikota Medan | Jl. Jend. Sudirman No, 35. |
| 28 | 28/CB/B/2021 | Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara | Jl. Jend. Sudirman No. 41. |
| 29 | 29/CB/B/2021 | Kantor PTPNIV | Jl. Letjend Soeprapto No. 2. |
| 30 | 30/CB/B/2021 | Kantor PPKS | Jl. Brigjend Katamso No. 51. |
| 31 | 31/CB/B/2021 | Kantor PT Telkom | Jl. H.M. Yamin No. 13. |
| 32 | 32/CB/B/2021 | Kantor PT. Kereta Api Indonesia | Jl. H.M. Yamin No. 14. |
| 33 | 33/CB/B/2021 | Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan | Jl. H.M Yamin No. 40. |
| 34 | 34/CB/B/2021 | Kompleks Pertokoan Pusat Pasar | Jl. Sutomo. |
| 35 | 35/CB/S/2021 | Lapangan Merdeka | Jl Balai Kota. |
| 36 | 36/CB/B/2021 | Bank Mandiri Eks Bank Exim | Jl. Balai Kota No. 1. |
| 37 | 37/CB/B/2021 | Bank Mandiri Eks Bank Bumi Daya | Jl. Balai Kota - JL A. Yani VH. |
| 38 | 38/CB/B/2021 | Stasiun KA Medan | Jl. Stasiun KA. |
| 39 | 39/CB/SR/2021 | Titi Gantung | Jl. Stasiun Kereta Api. |
| 40 | 40/CB/B/2021 | Asuransi Jasindo | Jl. Pulau Pinang No. 4 - Jl. Yani. |
| 41 | 41/CB/B/2021 | Eks Kantor PTPN DC peli Maatschappjj) | Jl. Tembakau Deli. |
| 42 | 42/CB/B/2021 | Eks Gedung Seng Hap | Jl. A.YaniNo.l. |
| 43 | 43/CB/B/2021 | Gedung PT London Sumatera | Jl. A.Yani No.2. |
| 44 | 44/CB/B/2021 | Gedung BNI dan Swalayan Indomaret (Eks Bank Modern) | Jl. A. Yani No. 36. |
| 45 | 45/CB/B/2021 | Restoran Tip Top | Jl. A. Yani No. 92. |
| 46 | 46/CB/B/2021 | Eks Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara | Jl. A.Yani No. 107. |
| 47 | 47/CB/B/2021 | Eks Kantor FT Dharma Niaga | Jl. A.YaniNo. 110. |
| 48 | 48/CB/B/2021 | Kantor Bank Mandiri Eks BDN | Jl. A Yani - Palang Merah. |
| 49 | 49/CB/B/2021 | Gedung Spa Feng Huang (Eks KNI) | Jl. Suka mulia No.13/Palang Merah. |
| 50 | 50/CB/B/2021 | Gedung Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera | Jl. Pemuda No. 2 - Palang Merah. |
| 51 | 51/CB/B/2021 | SD SMP Katolik St. Joseph | Jl. Pemuda No. 3 A. |
| 52 | 52/CB/B/2021 | Kantor Bank Tabungan Negara | Jl. Pemuda No. 6. |
| 53 | 53/CB/B/2021 | Kantor BNI Medan | Jl. Pemuda No. 8. |
| 54 | 54/CB/B/2021 | Apotik Kimia Farma | Jl*.* Palang Merah No. 32, |
| 55 | 55/CB/B/2021 | Sekolah Nasrani | Jl. Kapt. Patimura No. 14. |
| 56 | 56/CB/B/2021 | Sekolah Budi Murni | Jl. Merapi No. 2 - Jl. MT Haryono. |
| 57 | 57/CB/B/2021 | Sekolah Khalsa | Jl. Teuku Umar No. 14. |
| 58 | 58/CB/B/2021 | Museum AlwasHyah | Jl. Hindu No. 110. |
| 59 | 59/CB/B/2021 | Masjid Bengkok | Jl. Mesjid No. 62. |
| 60 | 60/CB/B/2021 | Masjid Ghaudiyah | Jl. K.H. Zainul Arifin. |
| 61 | 61/CB/B/2021 | Masjid Jamik | Jl. Taruma. |
| 62 | 62/CB/B/2021 | Masjid Haji Maraset | Jl. Sei Deli No. 139. |
| 63 | 63/CB/B/2021 | Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar | Jl. Kebun Bunga No.6/Jl. Kejaksaan. |
| 64 | 64/CB/B/2021 | Kuil Shri Mariamman | Jl.Teuku Umar No. 18. |
| 65 | 65/CB/B/2021 | Gereja Katolik Kristus Raja | Jl. MT Haryono No. 98 – Jl. Merapi. |
| 66 | 66/CB/B/2021 | Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat | Jl. Diponegoro No. 25 - 27. |
| 67 | 67/CB/SR/2021 | Jembatan Kebajikan | Jl. Zainul Arifin dan Jl. Gajah Mada. |
| 68 | 69/CB/SR/2021 | Menara Air Tirtanadi | Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Pandu. |
| 69 | 70/CB/B/2021 | Kolam Renang Paradiso | Jl. SM. Raja No. 6. |
| 70 | 71/CB/B/2021 | Kantor PLN | Jl. Listrik No. 9. |
| 71 | 72/CB/B/2021 | Rumah Tinggal (Eks Rumah Konsulat Amerika) | Jl. Imam Bonjol No. 13. |
| 72 | 73/CB/B/2021 | Eks Villa Kembar (Bagian dari Adi Mulia Hotel) | Jl. Diponegoro No. 12 . |
| 73 | 74/CB/B/2021 | Gedung Keuangan Negara Medan | Jl. Diponegoro No. 30 A. |
| 74 | 75/CB/B/2021 | Restoran Ria | Jl. Palangkaraya No, 11-15 disudut Jl. MT Haryono. |
| 75 | 76/CB/B/2021 | Eks Gedung Nasional | Jl. Sutomo No. 17 - Jl. Veteran. |
| 76 | 77/CB/B/2021 | Kantor PD Pasar | Jl. Sutomo No. P.75. |
| 77 | 78/CB/B/2021 | Rumah Tinggal Aim. M. Tahir Lubis | Jl. Manggis No.20. |
| 78 | 79/CB/B/2021 | Medan Club | Jl. Kartini No. 36. |
| 79 | 80/CB/B/2021 | Kantor Badan Pembinaan Administrasi Veteran Cadangan Kodam (Babinminvetcaddam) I Bukit Barisan | Jl. Letfen Suprapto No. 1, |
| 80 | 81/CB/B/2021 | Rumah Dinas Kapolda Sumut | Jl. Walikota No. 2. |
| 81 | 82/CB/B/2021 | Rumah Dinas Pimpinan B Indonesia | Jl. Jend Sudirman No. 37. |
| 82 | 83/CB/B/2021 | Rumah Dinas Pimpinan Bank Indonesia | Jl. Imam Bonjol No. 25. |
| 83 | 84/CB/B/2021 | Rumah Dinas Pimpinan Bank Indonesia | Jl. Imam Bonjol No. 27. |
| 84 | 85/CB/B/2021 | Museum Perkebunan Indonesia | Jl. Brigd Katamso No. 53. |
| 85 | 86/CB/SR/2021 | Taman Sri Deli | Jl. S.M. Raja - Jl. Mesjid. |
| 86 | 87/CB/SR/2021 | Kebun Bunga (Taman Tjong Jong Hian) | Jl.Kejaksaan. |
| 87 | 89/CB/B/2021 | Stasiun Pulu Brayan | Jl. Kol. Yos Sudarso No. 128. |
| *88* | 90/CB/B/2021 | Balai Yasa Pulu Brayan | Jl. Bengkel No. 1 Pulo Brayan. |
| 89 | 91/CB/B/2021 | Stasiun Kereta Api Titi Papan | Jl. Yos Sudarso - Jl. Platina, Titi Papan, |
| 90 | 92/CB/B/2021 | Stasiun Kereta Api Labuan | Jl. Yos Sudarso, Pekan Labuhan. |
| 91 | 93/CB/B/2021 | Vihara Siu San Kene | Jl. Raya Labuhan. Jl. K.L. Yos |
| 92 | 94/CB/B/2021 | Stasiun Belawan | Jl. Sumatera, Belawan. |
| 93 | 95/CB/B/2021 | Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan | JI. Sumatera No. 116 Belawan. |

Bangunan-bangunan di atas merupakan bangunan cagar budaya yang berada di kota Medan dan ada sebagian yang sudah ditetapkan milik pemerintahan Kota Medan dan non pemerintahan Kota Medan (pribadi). Ibu Nurmalia menyatakan bahwa:[[9]](#footnote-9)

 “Mengenai cagar budaya yang sah milik pemerintahan kota Medan di buktikan dengan adanya Surat Keputusan mengenai cagar budaya dan terdapat di dalam undang-undang kemudian dipelihara, dilestarikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan jika non pemerintahan (pribadi) dibutuhkan usulan dari orang atau pengelola cagar budaya tersebut apakah cagar budaya nya itu mau didaftarkan sebagai cagar budaya atau tidak dan dalam hal perawatan nya mereka akan melakukan perawatan, pelestarian sendiri. Jika misalnya cagar budaya tersebut milik pemerintahan seperti hal nya Kantor Walikota Medan, Bank Indonesia, Kantor Pos dll itu memang sudah terdapat anggaran khusus dari Pemerintah.”

**b. Dokumentasi dan Publikasi**

Mempromosikan peninggalan kolonial yang tersebar dikota medan Ketua pusat studi sejarah dan ilmu-ilmu sosial universitas negeri medan (unimed) Dr. Phill. Ikhwan Azhari mengatakan:[[10]](#footnote-10)

 *“ ratusan bangunan bersejarah peninggalan belanda yang tersebar dibeberapa lokasi di Kota Medan merupakana daya pikat bagi wisatawan asing,jika ini dikelola secara baik,akan menjadi devisa”*

 Hingga saat ini, Medan sekedar transit wisatawan asing yang akan mengunjungi kawasan wisata Sumatera Utara , karena tidak ada yang bisa ditawarkan agar mereka mau tinggal sehari atau dua hari disana.

 *“kalau kita hanya menyeguhkan mall atau gedung modern pasti tidak adan menarik perhatian mereka. Karena yang mereka cari adalah tempat yang memiliki jejak masa lalu yang mengesankan seperti bangunan kuno disekitar lapangan merdeka”*

Ia mengatakan :

 *“konsep pariwisata diberbagai negara juga tidak meluluh menawarkan objek wisata yang memiliki pemandangan alam. Banyak kota dinegara lain yang dikunjungi wisatawan karena kota ini menawarkan situs bangunan kuno. Padahal kota medan memiliki modal untuk menjaring wisatawan dengan bangunan kuno”*

Menurut Dr. Phill. Ikhwan Azhari, salah satu yang harus dilakukan adalah

 *“melestarikan bangunan bergaya arsitektur sebelum tahun 1940-an yang sebagian besar merupakan peninggalan kolonial belanda. Kota medan dapat mencontoh roma,paris,london dan amsterdam , kota yang setia tahun mendapat kunjungan jutaan turis yang justru tertarik menikmati asmofir sejarah yang unik dengan bangunan-bangunan tua, seharusnya kata dia ,penguasa atau pengusaha dikota medan lebih mampu melihat nilai komersial pelestarian warisan sejarah kota itu sekaligus memandangnya sebagai bisnis properti yang menguntungkan,para pejabat kita sudah harus peka akan hal-hal seperti ini,apalagi mereka sering melakukan studi banding keluar negeri”ucapnya*

 Peranan media masa dan elektronik untuk membantu mempromosikan bangunan sejarah sebagai objek wisata yang harus dikembangan.

 Menurut Bapak Khairul Sekretaris Badan Warisan Sumatera :[[11]](#footnote-11)

*“peranan media masa dan eletronik sangat besar . benda cagar budaya merupakan media yang sangat sederhana namun efektif untuk belajar tentang kebudayaan.dengan mengetahui latar belakang. aspek kognitifdan arti simbolis dibalik suatu benda cagar budaya . pemahaman ini bermuara pada meningkatkan kesadaran budaya , bagaimana pun tidak dapat disangkal bahwa, masa kini adalah hasil daripada perkembngan masa silam, sedangkan dalam masa kini, terletak benih-benih masa depan”*

**D. Kendala Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya**

**a. Cagar budaya yang dikuasai perorangan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Bangunan | Fungsi Bangunan | Perlindungan Hukum |
| 1. | Kantor Bank Mandiri | Kantor | Perda No 6 /1998 |
| 2. | Hotel Natuor Deli | Hotel | Perda No 6 /1998 |
| 3. | Asuransi Jasindo | Kantor | Perwal no 433 /2021 |
| 4. | Restoran Tip Top | Restoran | Perwal no 433 /2021 |
| 5. | Bank Standard Charttered | Kantor | Perwal no 433 /2021 |
| 6. | Kantor BNI Medan | Kantor | Perwal no 433 /2021 |

**b. Cagar Budaya Yang Rusak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Bangunan | Kondisi Bangunan | Alamat |
| 1. | Masjid Bengkok | Rusak ringan | Jalan Masjid |
| 2. | Stadion Teladan | Rusak ringan | Jalan Stadion |
| 4. | Asuransi Jiwasraya | Rusak ringan | Jalan Gatot Subroto |
| 5. | Rumah Sakit Militer | Rusak ringan | Jalan Bandung No 4 |
| 6. | Eks Kantor Depnaker | Rusak Berat | Jalan Asmara No 143 |

**c. Cagar Budaya Yang Tidak Didaftarkan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Bangunan | Alamat |
| 1. | Gereja Kristen Batak | Jalan hang jebat |
| 2. | Restaurant tania | Jalan cipto |
| 3. | Pajak hindu | Jalan hindu |
| 4. | Pajak sambas | Jalan sambas |
| 5. | Ruko-ruko sudut | Jalan bogor,jalan bandung |
| 6. | Ruko-ruko gaya malaka | Jalan irian barat, jalan perniagaan |
| 7. | Komplek perum Rispa | Jalan brigjen katamso |

**E. Upaya yang dilakukan Pemko Medan Dalam Mengatasih Kendala dalam melindungi Cagar Budaya**

**a. Bantuan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Bangunan | Lokasi |
| 1. | Masjid AL- Osmani | JL. K.L Yos sudarso Km 17,5 |
| 2. | Istana maimun | Jl. Brigjen katamso No 66 |
| 3. | Majid Bengkok | Jl. Masjid |
| 4. | Sekolah Khalsa | Jl. Tengku Umar No 14 |
| 5. | Museum Perjuangan TNI | Jl. KH Zainul Arifin No 8 |
| 6. | Titi Gantung | Jl. Kereta Api No 2 |
| 7. | Tjong A fie | Jl. A Yani No 105 |

**b. Bersinergi Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Beranda Warisan Sumatera**

**1. Peran Badan Warisan Sumatera (BWS)**

 Badan Warisan Sumatera (BWS), adalah salah satu organisasi ataupun komuitas pecinta sejarah yang berada di Kota Medan, telah ada dan berdiri sejak tahun 1998. Pihak BWS selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan agar tidak dihancurkan dan dapat dilestarikan keberadaanya. Seperti melakukan penjagaan serta pengawasan terhadap bangunan-bangunan cagar budaya tersebut.

Menurut Kairul, salah satu Ketua Harian Badan Warisan Sumatera (BWS). adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BWS untuk menjaga dan meletarikan bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan antara lain yaixu melakukan edukasi publik kepada masyarakat agar menjaga dan kelestarikan bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Serta melakukan dokumentasi yang rutin terhadap bangunan-bangunan tersebut, seperti mengambil foto-foto pada bangunan tersebut, mengumpulkan karya-karya ilmiah atuaupun peneiilian-penelitian yang dilakukan pada bangunan-bangunan cagar budaya tersebut.

“Sejak berdirinya BWS ini, kami selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga maupun mengawasai bangunan dan selalu mempeijuangkan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan agar tidak dihancurkan. Kami juga melakukan sosialisasi-sosialisasi ataupun edukasi publik kepada masyarakat luas dan juga kepada para pemilik ataupun pengelola bangunan tersebut agar tetap menjaga bangunan sejarah yang dimiliki ataupun yang dikelolanya”.

“Kami juga melakukan dokumentasi yang rutin terhadap bangunan-bangunan tersebut dalam beberapa tahun sekali, agar bentuk dan juga fungsi dari bangunan tersebut dapat terlihat melalui dokumentasi tersebut. Apakah bangunan tersebut mengalarni perubahan atau tidak. Kemudian kami juga mengumpulkan buku-buku ataupun makalah-makalah, sejta karya-karya tulis lainnya yang berkaitan dengan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui nilai-nilai yang ada pada masing-masing bangunan cagar budaya tersebut”.

1. **Hambatan Badan Warisan Sumatera (BWS)**

Menurut Ketua Harian BWS Hairul, hambatan yang paling utama adalah kurangnya peran dari para pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya tersebut dan juga kurangnya peran dari pemerintah Kota Medan dalam memperhatikan bangunan cagar budaya yang dimilikinya. Serta terdapat juga faktor tidak diketahuinya siapa pemilik dari bangunan cagar budaya tersebut.

“Kalau berbicara hambatan dalam melesiarikan bangunan cagar budaya pasti ada, hambatan yang paling utama adalah kurangnya peran dari pemilik bangunan cagar budaya tersebut, dan juga pemerintah Kota Medan itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap bangunan yang mereka miliki saat ini kurang penting, hal tersebut yang menyebabkan bangunan-bangunan cagar budaya tersebut tidak terawat dengan baik. Ada juga faktor dana yang menjadi kendala bagi para pemilik untuk melakukan perawatan terhadap bangunannya”.

“Kami pihak BWS selalu memberikan bimbingan ataupun edukasi publik kepada para pemilik bangunan cagar budaya dan juga masyarakat luas akan pentingnya bangunan Dari hasil uraian diatas, dapat diketahui apa-apa saya yang menjadi hambatan dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya yang di kawasan Kesawan’’.

Pertama, adalah ketidaktahuan dari para pemilik bangunan cagar budaya tersebut, bahwa bangunan yang dimilikinya adalah suatu peninggalan masa kolonial Belanda yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai-nilai penting akan kesejarahan, pendidikian, maupun arsitektur.

Kedua, adapun juga dari para pemilik yang telah mengetahui namun tidak berperan dalani melestarikan bangunan tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan perawatan terhadap bangunan cagar budaya tersebut, karena dana yang dibutuhkan untuk melakukan peravvatan bangunan tersebut sangatlah banyak, seperti melakukan pengecetan ulang maupun merenovasi bangunan agar sesuai dengan bentuk aslinya.

Ketiga, adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap banguan cagar budaya yang ada di Kota Medan, khususnya kawasan Kesawan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan cagar budaya yang terdapat di kawasan Kesawan hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada dilakukannya perawatan maupun perbaikan terhadap bangunan tersebut. Kemudian kurangnya pendataan kembali mengenai bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan Kesawan, apakah termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya daerah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau bangunan cagar budaya di tingkat nasional

**c. Mengakodomasi Aspirasi Pemilik Cagar Budaya**

**a. Pengelola Tjong A Fie Mansion**

 Hal sama juga disampaikan oleh Rudiansyah. Sebagai salah satu wakil pengelola/humas dari Tjong A Fie Mansion, ia mengatakan bahwa mereka selaku pihak yang mengelola Tjong A Fie Mansion ini mengetahui jika bangunan yang mereka keiola termasuk kedalam bangunan cagar budaya nasional yang terdapat di Kota Medan, yang tentunya hams dilindungi dan juga dilestarikan keberadaannya

 “....iya, saya tau tentang peraturan daerah tersebut, saat ini pun bangunan Tjong A Fie ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya nasional melalui keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata tahun 2010. Itu setahun setelah bangunan ini dibuka untuk umum. Kan tahun 2009 bangunan ini dibuka untuk umum”

 Menurut Rudiansyah, bahwa bangunan Tjong A Fie Mansion ini tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup berarti, karena bentuk dan fungsi bangunan ini tetap sama seperti sebelumnya. Adapun hal yang berubah pada bangunan ini yaitu pada fungsinya, yang sebelumnya bangunan ini adalah rumah pribadi kediaman dari Tjong A Fie. yang sekarang bangunan ini berubah dan telah menjadi museum dan telah dibuka untuk umum.[[12]](#footnote-12)

 "Bangunan Tjong A Fie Mansion ini, tidak begitu mengalami perubahan yang berarti, terutama dari segi bentuknya, namun dari segi fungsin, bangunan ini mengalami perubahan, yang dahulu bangunan ini adalah sebagai tempat tinggal atau kediamannya Tjong A Fie dan keturunannya, namun sekarang bangunan ini sudah menjadi museum atau tempat wisata yang terdapat di Kota Medan, sejak dibukanya Tjong A Fie Mansion ini ke publik pada tahun 2009".

Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak Tjong A Fie Mansion dalam mencari dana untuk melakukan perawatan dan perbaikan bangunan tersebut. Dana untuk melakukan perawatan dan perbaikan bangunan tersebut didapatkan dari tiket para pengunjung/wisatawan Tjong A Fie Mansion. Namun sebelam dibukanya Tjong A Fie Mansion ke publik, dana untuk perawatan dan perbaikan bangunan tersebut diberikan oleh pemerinta Kota Medan. oahkan kedutaan Amerika sangat memnantu dan mendukung program tersebut, terutama pendanaan awal untuk membuka Tjong A Fie Mansion ini ke publik

" Kalau berbicara dana untuk perawatan dan perbaikan gedung ini ada dana pribadi dari Tjong A Fie Mansion ini sendiri, yang didapatkan dari hasil penjualan tiket pengunjung. Mengenai bantuan dana, Tjong A Fie Mansion ini juga dibantu oleh pemerintah Kota dan pada saat awal-awal ingin dibukanya Tjong A Fie Mansion ini, support terbesar pada saat itu diberikan oleh kedutaan Amerika. Jadi pendanaan awal sehingga dibukannya Tjong A Fie Mansion ini diberikan oleh kedutaan Amerika dan pemerintah Kota Medan. Sampai saat ini Peranan masyarakat dan instansi- instansi pemerintah pada saat itu sangat tinggi dan sangat membantu sekali. Karena mereka tau nilai sejarah yang terkandung pada TjongA Fie Mansion in".

**b. Hambatan Bagi Pengelola Tjong A Fie Mansion**

Demikian juga halnya dengan pemilik ataupun pengelola gedung cagar budaya lainnya. Pengelola Tjong A Fie Mansion, mengatakan bahwa hanya pada awal-awal dibukanya Tjong A Fie Mansion pada ini untuk publik mereka Luengalami hambatan yang cukup sulit. Hambatan itu terkait dengan bantuan dana dari pemerintah yang kurang lancar, serta kurangnya pemandu wisata, petugas kebun dan juga petugas kebersihan. Namun seiring berjalannya waktu, hambatan tersebut semakin berkurang, seperti yang disampaikan oleh pengelola TjongA Fie Mansion

 “Kalau hambatan pasti ada, karena kendala itu sepertinya hal yang wajar ketika kita membuka tempat-tempat yang baru, seperti awal-awal dibukanya Tjong A Fie Mansion ini untuk umum, Pada masa itu, hambatan yang dialami adalah seperti pendanaan dari pemerintah yang kurang lancar, kemudian kurangnya tenaga kerja seperti pemandu wisata, petugas kebun dan juga petugas kebersihan. hal tersebut ierjadi karena pengeJolahan Tong A Fie Mansion ini yang belum termanage dengan baik. Kami menyebumya adalah masa peralihan. dari bangurian yang privat ke bangunan untuk publik. Dari masa peralihan itulah pihak keluarga belajar dengan baik dan seksama untuk kedepannya agar lebih baik lagi dalam mengelola Tjong A Fie Mansion ini. Seperti saat ini”

Pada tahun 2017 pihak pemilik dan juga pengelola Tjong A Fie Mansion mendapatkan tawaran dari Dinas Pariwisata Kota Medan untuk merenovasi seluruh bangunan Tjong A Fie Mansion dan akan membuat bangunan tersebut meiijadi sebuah penginapan. Namun pihak pemilik dan juga pengelola Tjong A Fie Mansion pada saat itu tidak menginginkan renovasi menyeluruh pada bangunan tersebut. Menurut Rudiansyah pemilik dan juga pengelola tidak langsung menerima dan menyetujui tawaran dari pemerintah tersebut. Pihak pengelola masih perlu mengevaluasi ulang tawaran tersebut, terutama pihak pengelola tidak ingin nilai-nilai historis yang ada pada bangunan tersebut hilang karena renovasi yang dilakukan nantinya

 “Kalau saya boleh mengatakan, dulu pada tahun 2017, ada tawaran dari pihak Dinas Pariwisata untuk merenovasi seluruh bangunan Tjong A Fie Mansion ini. Renovasi tersebut nantinya akan dibangun sebuah penginapan. Dinas pariwisata ingin mengadopsi beberapa bangunan-bangunan tua di daerah-daerah lain. Seperti yang ada di Penang. Malaysia. Disana terdapat bangunan cagar budaya yang telah direnovasi dan dijadikan sebuah penginapan. Namun cucu ataupun keluarga dari Tjong A Fie yaitu ibu Mimi Tjong tidak langsung mengiyakan tawaran dari dinas pariwisata tersebut. Karena kita perlu mengevaluasi nilai-nilai historis yang ada pada bangunan ini. Takutnya nilai-nilai historis yang ada pada bangunan ini terkikis dan akan hilang nantinya”

Selain tawaran dari pihak Dinas Parhvisata tersebut, pihak Tjong A Fie Mansion tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melestarikan dan menjaga bangunan cagar budaya yang dimilikinya. Saat ini Tjong A Fie Mansion ini sudah mulai berkembang pesat sebagai destinasi wisata di Kota Medan, karena daftar para pengunjung Tjong A Fie Mansion terus bertambah sampai saat ini, bahkan ada juga tuns dari luar daerah dan turis mancanegara yang berkunjung.

**2. Masyarakat di Sekitaran Kawasan Kesawan**

 Tidak semua bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di kawasan Kesawan dalam keadaan baik dan terawat. Banyak juga dari bangunan-bangunan cagar budaya tersebui yang sudah mulai hancur dari segi bentuk, dan juga perubahan dari segi fungsinya. Salah satu dari bangunan cagar budaya tersebut adalah Gedung Eks Dinas Tenaga Kerja yang berada di Jln. Hindu/Ahmad Yani VII. Bangunan ini sangat tidak terawat, terlihat jelas dari bentuk bangunanya yang sudah mulai rusak melalui proses alam yang terjadi dan juga kebakaran pada bangunan.

Seperti yang telah disebutkan, bahwa kawasan Kesawan memiliki beberapa bangunan yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan ada juga beberapa bangunan yang telah dilindungi oleh peraturan pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat. Dalam bab ini penulis melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Kesawan yang sudah ditetapkan dan dilindungi oleh pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat.

Masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini antara lain, orang-orang yang memiliki dan juga mengelola bangunan cagar budaya tersebut, seperti pengelola Restoran Tip Top, TjongA Fie Mansion, Mesjid Lama Gang Bengkok, dan ada juga masyarakat yang hanya mendiami ataupun menghuni bangunan tersebut, seperti halnya di bangunan Gedung Eks Dinas Tenaga Kerja. Selain itu ada juga pihak akademisi dan juga organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas pecinta sejarah seperti Badan Warisan Sumatera (BWS), yang berada di Kota Medan.

Hampir semua dari pemilik, ataupun pengelola bangunan cagar budaya yang menjadi narasumber pemah mendengar dan bahkan mengetahui bahwasanya bangunan yang mereka kelola atau tempati telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Kota Medan maupun pemerintah pusat sebagai suatu bangunan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

 Dalam melakukan perannya untuk menjaga atau melestarikan bangunan cagar budaya tersebut, langkah-langkah yang diambil oleh para pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya tersebut bermacam-macam. Ada yang tetap mempertahankan dari segi bentuk dan fungsi dari bangunan tersebut, bahkan ada juga yang melakukari perawatan intensif pada bangunan tersebut.

Adapun dari pihak pemilik ataupun pengelola bangunan cagar budaya tersebut melakukan perawatan dan penjagaan seperti menjaga kebersihan disekitar lingkungan bangunan cagar budaya tersebut. serta jika bangunan cagar budaya tersebut sudah mulai mengalami kerusakan, maka pihak pemilik ataupun pengelola secepatnya mengambil sikap untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap bangunan tersebut. Seperti melakukan pengecetan ulang pada dinding-dinding bangunan yang sudah mulai terkelupas dan juga mengganti atap-atap yang sudah mulai bocor. Hal tersebut dilakukan agar material bangunan yang sudah mulai rusak tersebut tidak semakin parah, karena bertambahnya kerusakan pada bangunan tersebut.

Dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya tersebut, banyak dari para pemilik ataupun pihak pengeiola bangunan tersebut yang memakai dana pribadinya ataupun dana yang didapatkan dan dikelola dari para pengunjung bangunan tersebut. Namun ada juga dari para pemilik ataupun pihak pengeiola bangunan tersebut yang mendapat bantuan dana dari masyarakat setempat, dan ada juga yang mendapat bantuan dana dari pemerintah.

Dari berbagai hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya peran masyarakat baik itu pihak pemilik. pengelola, komumia-komunitas pecinta sejarah maupun akademisi tetap ada sampai saat ini, walaupun masih dalam kategori kurang maksimal. Namun dalam melakukan hal tersebut, masyarakat tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Pihak pemerintah lokal, terutama Pemko Medan melalui dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan cenderung pasif dalam mendukung peran masyarakat.

Terutama dalam pengawasan dan penjagaan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan khususnya kawasan Kesawan, sehingga banyak bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah mulai rusak dan bahkan hancur. Selayaknya peran kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah Kota Medan lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan pentingya suaru bangunan cagar budaya. Terutama bangunan-bangunan cagar budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kesejarahan, pendidikan, dan arsitektur, khususnya bagaimana Kota Medan ini bisa terbentuk sampai saat ini.

Namun ada juga dari pengelola ataupun masyarakat yang menghuni bangunan cagar budaya yang tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan karena tidak adanya dana pribadi maupun dana bantuan dari pemerintah Kota Medan untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada bangunan tersebut, sehingga saat ini bangunan tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, tidak sesuai dengan bentuk dan fungsi aslinya lagi.

Perubahan bentuk dan tungsi dari bangunan tersebut berawai dari kerusakan oleh alam, seperti pada dinding bangunan yang sudah mulai berlumut, bahkan ada juga bagian-bagian material dari bangunan tersebut yang diambil oleh orang yang tidak dikenal, karena bahan-bahan material dari bangunan tersebut langka dan mahal bisa dijual. Sehingga bangunan-bangunan ini menjadi tidak terawat dan hanya dibiarkan saja oleh para pengelola maupun pemerintah Kota Medan.

 Untuk melestarikan bangunan cagar budaya, seharusnya masyarakat juga mengambil peran aktif, termasuk dalam hal menjaga maupun mengawasi bangunan cagar budaya tersebut, agar tetap terjaga nilai-nilai kesejarahan, pendidikan, dan arsitektur yang terkandung pada bangunan tersebut. Masyarakat seperti, komunitas-komunitas pecinta sejarah, ataupun pihak akademisi seharusnya dapat memberikan edukasi publik kepada masyarakat mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung pada bangunan tersebut. Mulai dari nilai kesejarahannya, pendidikannya, arsitekturnya dan lain sebagainya.

Sampai saat ini peran masyarakat yang dimaksudkan di atas memang ada dalam berbagai bentuk, misalnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat ataupun

komunitas-komunitas pecinta sejarah yang selalu mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan betapa pentingnya suatu bangunan cagar budaya.

**Peran Masyarakat di Sekitaran Kawasan Kesawan**

Banyak dari masyarakat di sekitaran kawasan Kesawan yang mengetahui bahwa bangunan-bangunan tua yang berada di kawasan Kesawan adala bangunan

peninggaian masa kolonial Belanda. Seperti penuturan Bambang, salah satu pedagang yang berjualan di sekitaran kawasan Kesawan. Akan tetapi, mengenai bagaimana peran masyarakat selama ini dalam menjaga dan juga mslestarikan bangunan cagar budaya, masyarakat sekitaran kawasan Kesawan kurang rriengetahuinya.

"..Iya, benar saya mengetahui bahwa bangunan-bangunan tua yang terdapat di kawasan Kesawan adalah peninggaian masa kolonial Belanda, namun saya kurang mengetahui apa guna dan fungsi bangunan tersebut pada masa kolonial Belanda dulu. Kalau masalah peran masyarakatnya, saya juga kurang mengetahui, apa-apa saja peran yang sudah dilakukan masyarakat untuk itu, karena saya juga orang awam, jadi kurang mengetahui hal-hal yang seperti itu"[[13]](#footnote-13)

 Restoran. Selain itu, pihak pengelola juga melakukan pengecetan kembali dinding- dinding bangunan yang sudah mulai keropos dan berganti warna.

"Kalau untuk bentuk dan fungsinya, bangunan ini tetap sama seperti pada awalnya. yaitu sebuah restoran. Tidak ada perubahan yang terjadi, apalagi merubah dari bentuk dan fungsi bangunan. Kalaupun ada perubahan yang terjadi, itu dilakukan hanya untuk perawatan bangunannya saja, seperti melakukan pengecetan kembali dinding-dinding yang sudah mulai berubah wamanya. Kemudian perubahan material dari bangunan, misalnya kayu yang ini sudah mulai keropos, ya kami ganti dengan kayu yang baru. Tapi untuk bentuk bangunan tctap hams dipertahankan.[[14]](#footnote-14)

Mengenai dana perawatan bangunan tersebut, mcnurut Kus dana tersebut

memakai dana pribadi dari Restoran Tip Top. Dana tersebut biasanya didapatkan dari hasil Restoran Tip Top itu sendiri, seperti keuntungan penjualan dan lain sebagainya.[[15]](#footnote-15)

“Kalau mengenai dana perawatan untuk bangunan restoran Tip Top ini, maksud kamu seperti melakukan pengecetan dan juga perawatan material-material lainnya pada bangunan ini. Kalau itu ya dananya dari dana pribadi restoran Tip Top itu sendiri. Dana yang kami dapatkan dari para pengunjung restoran ini”

**3. Pengelola Mesjid Lama Gang Bangkok**

Menurut Mukhlis Tanjung, salah satti pengelola ataupun Badan Kenaziran Mesjid (BKM) dari Masjid Lama Gang Bengkok, bahwasanya bangunan Mesjid Lama Gang Bengkok ini tetap sama seperti dahulu mulai dari segi bentuk dan juga

fungsinya, tidak ada mengalami perubahan yang signifikan. Jika ada suatu perubahan yang terjadi adalah karena adanya pergantian material bangunan lama yang sudah mulai rusak. seperti atap yang mengalami kebocoran, dinding-dinding bangunan yang sudah muiai lerkeiupas, dan lain sebagainya.

"Kalau untuk bangunan ini dari segi bentuk dan fungsinya tetap sama, tidak ada perubahan bentuk dan fungsi dari Mesjid Lama Gang Bengkok ini. Semua masih sama, mulai dari warna dan bentuk bangunannya. Kalau pirn ada yang berubah, paling material-material kecil yang ada pada bangunan ini, seperti pada atapnya. Kalau atap bangunan ini bocor, maka kami ganti dengan yang baru. Lainnya tetap sama, seperti bentuk dan fungsi dari bangunan Mesjid Lama Gang Bengkok ini'’

 Dalam hal dana untuk melakukan perawatan terhadap Mesjid Lama Gang Bengkok ini. Menurut Mukhlis, mereka mendapatkan dana untuk melakukan perbaikan dan perawatan bangunan mesjid ini dari bantuan masyarakat sekitar wilayah mesjid dan juga dari bantuan pemerintah. Bentuk-bentuk bantuan dari masyarakat tersebut bermacam-macam, ada yang memberikan melalui infak-infak pada saat beribadah, dan ada juga bantuan yang diberikan dalam bentuk material-material bangunan. seperti semen, keramik, dan lain sebagainya.

 "Kalau masalah dana untuk perawatan dan perbaikan mesjid ini, biasanya kami dapatkan dari infak-infak para jamaah yang sholat di mesjid ini, sama ada juga bantuan dari masyarakat setempat. Kalo dana atau bantuan dari pemerintah itu ada, tapi kami pihak nazir mesjid tiriak pernab memintanya, maksudnya seperti mumbual proposal. Kalaupun mesjid mau ada perbaikan itu biasanya para masyarakat yang memberikan bahan-bahan material bangunan yang dibutuhkan"

**Hambatan Bagi Pengelola Mesjid Lama Gang Bengkok**

Pengelola pada Mesjid Lama Gang Bengkok juga tidak begitu mengalami hambatan yang berarti dalam melestarikan bangunan cagai budaya yang mereka miliki, sesuai seperti yang disampaikan oleh Mukhlis Tanjung salah satu pengurus Badan Kenaziran Mesjid Lama Gang Bengkok.[[16]](#footnote-16)

 “Kami selaku nazir Mesjid, tidak mengalami hambatan yang berarti dalam melakukan perawatan Mesjid ini, karena kami memili dana yang telah diberikan oleh jamaah mesjid melalui infak-infak mesjid ini, dan juga jika setiap ada perbaikan Mesjid, maka pihak jamaah Mesjid selalu sukarela membantu perbaikan tersebut seperti membeli bahan-bahan material yang diperlukan untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan bangunan mesjid ini.

**4. Masyarakat Penghuni Bangunan Gedung Eks Dinas Tenaga Kerja**

 Salah satu bangunan yang sudah tidak terawat, bahkan sudah mulai mengalami kerusakan adalah Gedung Eks Tenaga Kerja yang sudah mulai hancur bentuk dan fungsi dari bangunannya. Berikut penuturan Ono, salah satu masyarakat yang mendiami Gedung Eks Tenaga Kerja. Menurutnya, banyak dari bahan-bahan material pada bangunan yang telah diambil oleh orang yang tidak dikenal, karena bahan-bahan material tersebut mahal jika dijual. Bangunan ini juga pernah mengalami kebakaran, hal tersebut yang membuat sisi-sisi pada dinding bangunan kelihatan hitam, dan juga kayu-kayu pada bagian atap dapat sudah tidak sekuat dan sekokoh dulu, dapat roboh dan membahayakan siapapun.[[17]](#footnote-17)

 “Kalau yang punya bangunan ini, kami pun kurang tau siapa pemiliknya. Tapi ada yang bilang yang punya ini masih orang Belanda atau Inggris gitu. Pokoknya orang luarlah. Paling kaini cuma bisa jaga sama rawat tempat ini sebisa kami ajalah. seperti membersihkan tempat ini. Kalau seperti ngecat bangunan ataupun merenovasinya, kami tidak sanggup. Mana ada dana kami untuk melakukan itu. Kaiau pihak pemerintah pernah ada daiang, tapi cuma melihat- lihat gitu-gitu aja Tidak ada keianjutannya, apakah bangunan ini akan direncvasi ulang atau tidak kami belum tau karena belum ada kejelasannya sampai saat ini”

 “Banyak bahan-bahan material pada bangunan yang sudah diambil dari sini. Diambii sama orang yang tidak dikenal. Karena bahan-bahn material tersebui mahal jika dijual. Pernah juga gedung ini mengalami kebakaran. Kayu pada bagiar. atapnya yang terbakar waktu. Makanya hitam-hitam semua dinding yang ada di lantai 2 itu. Kalau ada masyarakat yang mau masuk ke sini jarang saya kasih. Takutnya roboh kayu atap sama genteng-gentengnya, nimpa pengunjung pulak nanti”

**Hambatan Bagi Masyarakat Penghuni Bangunan Gedung Eks Tenaga Kerja**

 Berikut penuturan Ono, salah satu masyrakat yang menghuni Gedung Eks Tenaga Keija. Menurutnya hambatan yang paling dirasakan dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya ini adalah tidak adanya dana yang dimiliki untuk melakukan perawatan terhadap bangunan tersebut, seperti melakukan perbaikan ataupun melakukan renovasi menyeluruh terhadap bangunan tersebut Agar material-material bangunan yang sudah mulai rusak tersebut dapat kembali ke bentuk dan fungsi sebagaimana mestinya.

 "Kalau mau melakukan pelestarian pada bangunan ini, itukan memerlukan dana yang tidak sikit jumlahnya. terutama dalam melakukan renovasi yang menyeluruh terhadap bangunan ini. Agar bangunan ini kembali seperti dahulu. Hal yang kelihatan kecil saja sudah memakan uang banyak, seperti melakukan pengecatan kembaii bangunan ini, apalagi harus merenovasi seluruh bangunan ini, sudah pasti memerlukan banyak dana, apalagi banyak material-material pada bangunan ini sudah habis terbakar, seperti kayu pada atap-atap bangunan tersebut. Jadi kalau hambatan yang paling utama adalah dana dan juga eran pemerintah untuk mengelolahnya”

**5. Mengakodomosikan Aspirasi Akademisi**

**a. Peran Pihak Akademis**

Kemudian peran pihak akadernisi yang sampai saat ini juga tetap masih ada melalaui pembuatan tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis dan lain-lainnya. Edukasi publik juga dilakukan oleh para akadernisi melalui seminar-seminar tentang pentingnya bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Hal tersebut disampaikan oleh Isnen Fitri, salah satu dosen di Program Studi Arsitektur Universitas Sumatera Utara (USU).

 Menurut Isnen Fitri, salah satu dosen di Program Studi Arsitektur USU, pihak akademisi juga melakukan peran dalam meiestarikan bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pihak akademisi antara lain melakukan edukasi publik terhadap masyarakat, seperti melakukan acara ataupun seminar-seminar yang berkaitan tentang perlunya kesadaran dalam menjaga maupun melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya.

Serta pihak akademisi juga melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang ada, agar penelitian tersebut dapat diguanakan sebagai pedoman untuk merawat dan juga menjaga bangunan-bangunan cagar budaya tersebut kedepannya.

“Mengenai peran pihak akademisi dalam melakukan pelcsiarian bangunan cagar budaya, kami biasanya hanya melakukan edukasi publik kepada masyarakat, seperti melakukan seminar-seminar yang berkaitan dengan pentingya kesadaran masyarakat dalam meiestarikan bangunan caar budaya. Serta melakukan pengkajian-pengkajian ataupun penelitian yang bersifat ilmiah mengenai bangunan cagar budaya tersebut. Agar hasil-hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi pedoman kedepannya dalam melakukan pelestarian terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang ada.

**b.** **Hambatan Bagi Pihak Akademisi**

Menurut Isnen Fitri salah satu akademisi/dosen di Program Studi^Arsitektur USU, hambatan yang dialami dalam melestarikan bangunan cagar budaya di Kota Medan adalah Peran serta pemerintah dalam menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan eenderung pasif. Seperti dalam melakukan pendataan ataupun meregistrasi kembali bangunan-bangunan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan, khususnya kawasan Kesawan. Banyak dari banguan cagar budaya yang terdapat di Kota Medan hilang pada saat dilakukannya pendataan kembali pada tahun 2012, yang sebelumnya dilakukan pendataan pada tahun 1988.

Kemadian dalam penerapan kebijakan-kebijakannya, pemerintah Kota Medan seharusnya bisa memberikan perhatiannya yang lebih, karena peran pemerintah Kota Medan sangatlah penting dalam melestarikaji bangunan cagar budaya yang ada, karena bangunan cagar budaya tersebut adalah aset yang sangat berharga bagi Kota Medan.[[18]](#footnote-18)

“Menurut pengamatan saya, kita banyak kekurangan pada penerapan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan daerah Kota Medan. Seharusnya bangunan-bangunan cagar budaya yang telah terdata tersebut dijaga dan dilestarikan keberadaanya. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya, malah berkurang jumlah bangunan cagar buadaya. Sebelumnya dilakukan registrasi bangunan cagar budaya pada tahun 1988, kemudian dilakukan kembali pada tahun 2000, namun apa yang terjadi, terdapat beberapa bangunan cagar budaya tersebut yang hilang dan tidak ada lagi, bahkan 5 bangunan sekaligus. Bangunan-bangunan tersebut bisa hilang karena sudah dirubuhkan”[[19]](#footnote-19).

“Kemudian pihak pemerintah saat ini dalam melakukan pelestarian bangunan cagar budaya cenderung pasif, seharusnya mereka selaku pemerintah Kota Medan hams lebih memperhatikan bagaimana kondisi bangunan cagar budaya yang dimilikinya. Seperti dalam Peraturan Daeah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Medan 2011-2031. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa kawasan Lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan adalah kawasan inti bersejarah Kota Medan”.[[20]](#footnote-20)

“Namun sampai saat ini, setelah dikeluarkan peraturan daerah Kota Medan tersebut, belum ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Medan, seperti penetapan batas-batas wilayah kawasan Lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan, kemudian daftar-daftar bangunannya, serta panduan yang dipakai untuk mengatur bagaimana cara dan konsep dari pelestarian bangunan cagar budaya tersebut”

1. Landasan Filosofis UUD 1945 [↑](#footnote-ref-1)
2. UU NO. 28 Tahun 2004 Tentang Bangunan Gedung [↑](#footnote-ref-2)
3. UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Cagar Budaya [↑](#footnote-ref-7)
8. Peraturan Walikota Medan Nomor 42 Tahun 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Ibu Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, Medan, Tanggal 28 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Dr. Phill. Ikhwan Azhari , Medan, Tanggal 21 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara Bapak Khairul Sekretaris Badan Warisan Sumatera, Medan, Tanggal 27 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara, dengan Rudiansyah, Medan 2 juni 2022 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wawancara, dengan Bambang, Medan pada tanggal 2 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*

 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. Wawancara, dengan Mukhlis, Medan pada tanggal 5 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara, dengan Pak Ono, Medan 2 juni 2022 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan ibu Isnen Fitri, Medan 2 juni 2022 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid* [↑](#footnote-ref-20)